

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan di berlakukannya Undang-undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah di haruskan melaksanakan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik. Pemerintahan yang baik dan bersih di tujukan pada aparatur perangkat daerah di harapkan memiliki kinerja yang baik yaitu dengan mengelola anggaran secara ekonomis,efisien dan efektif.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi (Bastian, 2016:274). Kinerja pemerintah dapat di pahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang di sebabkan kepada organisasi tersebut (Suwandi 2013) untuk dapat mengetahui apakah kinerja

tersebut efektif maka harus di lakukan perbandingan terhadap anggaran, karna anggaran merupakan tolak ukur terbaik dalam menilai kinerja.

Desentralisasi adalah seberapa jauh manajer yang lebih tinggi mengizinkan manajer di bawahnya untuk mengambil keputusan secara independen (Afrida, 2013) sedangkan menurut UU No.23 Tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari desentralisasi untuk mencegah pemusatan keuangan. Dengan adanya desentralisasi organisasi mampu mengembangkan kemampuan yang di miliki, dapat menangani peristiwa, bertindak tanpa menunggu dan meningkatkan kualitas keputusan yang mendorong kinerja yang lebih baik.

Dalam *good governance*, akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. Akuntabilitas berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu sosial lainnya seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat erat kaitannya dengan instrumen dengan kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan penyampaiannya secara transparan kepada masyarakat. (Arifiyadi, Teguh, 2018).

Menurut Mulyadi (2014:3) pengertian sistem pengendalian manajemen sebagai, suatu sistem yang di gunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak di capai oleh organisasi, merencanakan

kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Supriyono (2017) menurut Supriyono (2017) sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang digunakan oleh manajemen untuk memengaruhi anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi serta efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sistem pengendalian manajemen terdiri atas struktur dan proses.

Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Konsep pengukuran kinerja yang hanya mengandalkan pada aspek finansial saja, saat ini mulai ditinggalkan, karena dianggap hanya mengejar tujuan kemampulabaan (*profitability*) jangka pendek semata. Terlebih jika pengukuran kinerja dilakukan bagi organisasi pemerintah yang tidak berorientasi profit, maka sangat diperlukan ukuran-ukuran yang lebih komprehensif. Kinerja pemerintah tidak hanya diukur melalui perspektif finansial saja tetapi juga dari perspektif non finansial seperti masalah pegawai yang dihubungkan dengan prestasi kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manurung (2012) hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa adanya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Ini berarti dengan meningkatnya pemahaman dari desentralisasi fiskal akan dapat meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah. Dalam hal

pelaksanaan akuntabilitas sendiri sudah menunjukkan hasil yang cukup baik dan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Dalam hal sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dengan semakin meningkatnya pelaksanaan sistem pengendalian manajemen maka akan meningkat juga kinerja satuan kerja perangkat daerah di kota Palangka Raya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan juga oleh Patmawari (2021) hasil penelitian menyatakan bahwa variabel desentralisasi, akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial organisasi pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu SKPD yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka. Dilihat dari rencana strategi Kabupaten Malaka serta Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Malaka adanya suatu kegiatan agenda Kabupaten Malaka yang belum tercapai. Beberapa perencanaan masih belum mencapai target dalam penyerapan anggaran belum dapat tercapai. (Kupang.antaranew.com)

Sebagai salah satu instansi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Malaka belum dapat menghasilkan suatu keberhasilan kerjanya baik dari aspek finansial serta tingkat pelayanan kepada masyarakat yang mana belum memenuhi suatu standar kelayakan kepada publik tersebut sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 serta UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Murti dkk., 2018; Rachmawati, 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap pegawai pemerintahan terutama organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan dan meningkatkan kinerja di dalam instansi atau organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan dan menunjukkan tata kelola yang baik. Begitu pentingnya kinerja organisasi perangkat daerah bagi suatu pemerintahan, maka hal ini menjadi sangat penting untuk diteliti kembali (Saputra *etal.*,2021)

Dengan demikian dalam penelitian ini,peneliti ingin melakukan penelitian, mengenai **Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.**

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Malaka)

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka,yang menjadi persoalan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat Pengaruh Desentralisasi Fiskal, terhadap Kinerja SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Malaka

2. Apakah terdapat Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Malaka
3. Apakah terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Malaka

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pengaruh Desentralisasi Fiscal terhadap kinerja SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Malaka
- b. Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Malaka
- c. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Malaka

##### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh desentralisasi fical, akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen terhadap

kinerja satuan kerja perangkat daerah, juga di harapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di pelajari di bangku perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana yang bermamfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah
- b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- c. Bagi pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada satuan kerja perangkat daerah di badan keuangan dan aset daerah kabupaten malaka dalam bentuk sumbangan pemikiran tentang pentingnya kesadaran akan pencapaian suatu kinerja baik secara finansial maupun non finansial sebagai dampak penerapan desentralisasi fiskal secara akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.